BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah analisa penulis pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Izin poligami tidak menjadi syarat seseorang sebelum berpoligami. Islam membolehkan poligami dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak boleh lebih dari empat orang istri sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4:3. Adapun adanya izin Pengadilan Agama sebelum berpoligami merupakan hal yang harus dilakukan suami agar perkawinan poligaminya tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. ketentuan izin poligami merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi istri dan anak dari perkawinan poligami. Izin dari Pengadilan Agama menjadi rujukan hukum yang bisa digunakan di kemudian hari jika terjadi perselisihan.
2. Adanya putusan Pengadilan Agama terkait pembatalan poligami tanpa izin dan ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama merupakan suatu upaya yang bertujuan sebagai perlindungan hukum bagi istri sebelumnya atau pihak lain yang dirugikan dalam poligami tanpa izin. Ketentuan tersebut mengandung nilai kemaslahatan untuk pihak yang menjadi dirugikan dalam kasus poligami tanpa izin, yaitu pihak perempuan atau istri

sebelumnya. Sebagaimana dalam teori *mashlahah mursalah*, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan). Mashlahah ini termasuk dalam tingkat *hajiyah*, yaitu pembatalan poligami tanpa izin tersebut jika tidak dilakukan bukan berdampak pada hilangnya esensi lima prinsip dasar tujuan syari'at (maqashid syariah). Namun, jika tidak dilakukan juga akan menimbulkan kerugian bagi perempuan atau istri pertama yang tidak ingin di poligami dan dikhawatirkan akan terjadi perselisihan.

Pembatalan perkawinan poligami tanpa izin jika ditinjau dalam hukum Islam memiliki akibat hukum hubungan suami istri berakhir seketika itu juga, namun tergolong dalam alasan batal perkawinan karena melanggar larangan menikah yang sifatnya hanya sementara. Sehingga dapat dilakukan perkawinan kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu mendapat persetujuan istri dan izin poligami dari Pengadilan Agama Setempat.

B. Saran-saran

1. Bagi pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen persyaratan perkawinan dengan lebih ketat dan harus dipastikan keasliannya sebelum menerimanya. Sehingga tidak terjadi pemalsuan identitas bagi seseorang yang melakukan poligami tanpa izin.

2. Bagi para hakim, ketentuan Pasal 71 KHI huruf a terkait pembatalan poligami tanpa izin dapat digunakan sebagai acuan untuk membatalkan poligami tanpa izin jika ada pihak yang mengajukannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan para pihak yang terlibat.
3. Bagi masyarakat, sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan pemerintah sebaiknya jika ingin melakukan poligami melakukan prosedur melalui izin Pengadilan Agama. Sehingga perkawinan poligaminya diakui oleh hukum dan terjaminnya kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak, yaitu suami dan istri-istrinya.